

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Gunawan Setiarja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius , Jogjakarta, 1990
- Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rjawali Press, 2012, Jakarta.
- Bambang Sunggono , Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, cet ke 16, Jakarta.
- Bachrudin , Hukum Kenotariatan (Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara), Jogjakarta, 2020, H
- Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Cst Kansil , Kamus istilah Hukum , Gramedia Pustaka , Jakarta, 2009.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T, Pokok-Pokok Etika Jabatan (Bandung; Pradnya Paramita 1979) Hal 5
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) Sinar Grafika Jakarta, 2018.
- E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan, Stora Grafika, 2001 Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris: Erlangga, 1996, Hlm 3.
- Habib Adjie , Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik , Refika Aditama, 2017.
- Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, 2017.
- Habib Adjie, Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2012)

- Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris, UII Press Yogyakarta, 2017.
- Lj Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Notodisoerjo, Soegondo R. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta Rajawali 1982), Hlm 13
- Mochamad Dja'is dan RMJ. Kusmargono, Membaca dan Mengerti HIR (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008)
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1993, Jakarta.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2013).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu, Jakarta, Raja Grafindo, 2015.
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum (Suatu tawaran Kerangka Berpikir), Refika Aditama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Cetakan kelima (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).
- Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta, Kencana, Jakarta 2016, Hal 352.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.

Undang – Undang No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

JURNAL / MAKALAH.

Ateng Syafrudin, *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”*, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, Hal 22

M.Syahrul Borman, Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

Philipus M. Hadjon, Tentang wewenang , Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang menghadapnya mempergunakan identitas Palsu di kota Pekanbaru.

Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi

Terhadap Notaris yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, 4 desember 2017. Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.

Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta,1990.

Setiawan, Hak Ingkar Notaris dari Hubungannya dengan KUHP (Jakarta: Suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta).

WEBSITE

Sidah, Legalisasi Akta dibawah Tangan, diakses di
<http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-aktadibawah-tangan.html>,
Tanggal 5 desember 2021